

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kemerdekaan merupakan cita cita tertinggi dari setiap negara yang terjajah, kemerdekaan atas ekonomi dan politik biasanya menjadi motor utama. Hal inilah yang kemudian mendasari Kosovo memberanikan diri untuk menyatakan kemerdekaannya terlepas dari pemerintahan Serbia yang dianggap otoriter, pada 17 Februari 2008 lalu. Setelah bertahun tahun hidup dalam cekaman otoriter Serbia yang memperlakukan Kosovo bak anak tiri, akhirnya Kosovo membulatkan tekad untuk menyatakan merdeka dan lepas dari Serbia.

Serbia yang merasa disalahkan oleh Kosovo dengan tuduhan sebagai “ibu tiri”, menganggap bahwa asosiasi tersebut hanyalah sebuah propaganda oleh pihak Kosovo dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari negara lain. Serbia yang tak ingin negaranya tepecah belah, dengan segala cara berusaha untuk menggagalkan kemerdekaan Kosovo. Mulai dari mendesak PBB untuk menentukan sikap, aktif melobby dan mencari dukungan dari negara lain yang menolak kemerdekaan Kosovo, hingga menentang sikap negara yang mendukung kemerdekaan Kosovo dengan memberikan kebijakan berupa ancaman sanksi diplomatik.

Kebijakan politik Serbia terhadap negara negara pendukung kemerdekaan Kosovo inilah yang menarik perhatian Penulis, sehingga Penulis memutuskan

untuk menggunakannya sebagai topik pembahasan dalam skripsi yang berjudul “*Kebijakan Luar Negeri Serbia Terhadap Turki Dalam Hal Kemerdekaan Kosovo*”.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “*Kebijakan Luar Negeri Serbia Terhadap Turki Dalam Hal Kemerdekaan Kosovo*” adalah :

1. Menjawab pokok permasalahan;
2. Mengetahui kebijakan luar negeri Serbia yang ditujukan kepada negara negara yang memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo, dan
3. Untuk menambah pengetahuan Penulis mengenai perkembangan politik Internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya negara Federasi Komunis Yugoslavia pada tahun 1991, yang diawali dengan runtuhnya rezim Josip Broz Tito menyebabkan negara Federasi ini terpecah menjadi enam bagian yang didominasi oleh Serbia setelah Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina dan Montenegro. Perpecahan ini tidak serta merta meruntuhkan juga naluri kekerasan dan otoriter dari pemerintahan Yugoslavia. Sikap tersebut ternyata terwariskan kepada negara pecahan terkuat dan terbesarnya yaitu Serbia. Hal ini terlihat dari kebijakan kebijakan

pemerintahan Serbia yang ditujukan kepada Provinsi Kosovo. Sebagai Provinsi yang masyarakatnya menjadi minoritas di negara Serbia, Kosovo seringkali tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari pemerintahan Serbia, dan walaupun ada itupun tidak terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan aspirasi masyarakat Kosovo.

Penduduk Kosovo didominasi oleh etnis Albania dengan jumlah 92 persen, sedangkan etnis Serbia hanya 4 persen, Bosnia dan Goran 2 persen, Romawi 1 persen dan Turki 1 persen. Uniknya, mayoritas penduduk Kosovo beragama Islam.¹ Selama berada di bawah pemerintahan Serbia, Kosovo yang didominasi oleh etnik Albania merasa kurang begitu nyaman, perlakuan perlakuan kejam dari pemerintahan Serbia kerap diterima, bahkan upaya “pembersihan etnis” (*ethnic cleansing*) pernah dialami etnis Albania Kosovo dalam dalih untuk memberantas kelompok separatisme di Kosovo.

Perlakuan perlakuan kasar, represif dan diskriminatif inilah yang menyebabkan semakin besarnya motivasi warga Kosovo untuk melepaskan diri dari pemerintahan Serbia dan mendirikan negara sendiri, negara Kosovo. Puncaknya pada 17 Februari 2008 lalu, Kosovo melalui dewan parlemennya di Pristina Ibukota Kosovo memproklamasikan kemerdekaan Kosovo lepas dari Serbia, setelah sebelumnya dilakukan voting oleh anggota parlemen Kosovo yang mayoritas beretnis Albania dan hasilnya mayoritas parlemen mendukung upaya deklarasi kemerdekaan tersebut.

¹ *Albania Bujuk OKI Internasionalisasi Masalah Kosovo*, terdapat di http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10977, akses tanggal 8 November 2008

Pernyataan merdeka ini sontak mengejutkan Internasional, terlebih lagi bagi Serbia yang merasa kedaulatannya terancam. Dengan segera, Serbia mengupayakan agar proklamasi kemerdekaan tersebut tidak menjadi sesuatu yang legal dan berkekuatan hukum. Pasalnya, pasca “pemukulan” mundur pasukan Serbia dari Kosovo pada tahun 1999 oleh pasukan PBB melalui NATO, PBB menyatakan bahwa Kosovo merupakan bagian dari kedaulatan Serbia dengan berada di bawah pengawasan PBB melalui NATO, dan hal tersebut tertuang ke dalam Resolusi PBB no.1244 tahun 1999.² Upaya Serbia menggagalkan kemerdekaan Kosovo dijalankan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mendesak PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas legalitas kemerdekaan tersebut. Serbia juga aktif meyakinkan negara negara lain agar tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dengan menyampaikan berbagai argumen. Serbia juga merangkul sekutu dekatnya Rusia untuk mendukung dan membantu perjuangannya dalam mempertahankan kedaulatan dengan menggagalkan kemerdekaan Kosovo.

Rusia yang ingin mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur, bersikap tegas dengan menolak kemerdekaan Kosovo dan berjanji akan menggunakan hak Veto-nya untuk menghadang upaya negara negara Barat memperoleh Resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan pengakuan kemerdekaan pada Kosovo. Sedangkan Amerika yang dengan tujuan strategis tertentu dan negara negara Uni Eropa lainnya, mendukung aspirasi kemerdekaan rakyat Kosovo.

² *DK PBB Kembali Beda Pendapat Soal Kosovo*, terdapat di <http://www.antara.co.id/arc/2008/2/19/dk-pbb-kembali-beda-pendapat-soal-Kosovo/>, akses tanggal 12 Oktober 2008

Amerika yang sudah menetapkan wilayah Kosovo sebagai bagian dari sistem pertahanan anti-rudal di Eropa, menjanjikan pengakuan sepihak jika PBB tak bisa mengakui kemerdekaan Kosovo.³ Bagi beberapa negara lain, kemerdekaan Kosovo disambut dengan baik terutama oleh negara-negara Uni Eropa dan negara Islam. Bagi Uni Eropa kemerdekaan Kosovo merupakan keuntungan, dengan pertimbangan yang tidak jauh berbeda dengan kepentingan Amerika. Karena seperti diketahui negara-negara Uni Eropa kebanyakan merupakan sekutu Amerika. Sedangkan bagi negara Islam yang tergabung ke dalam OKI, menilai bahwa kemerdekaan Kosovo merupakan aset bagi dunia Islam dan akan dapat memperkuat kerjasama antar negara Muslim, khususnya untuk kawasan Eropa.

Dukungan demi dukungan yang berupa pengakuanpun datang dari berbagai negara untuk Kosovo. Hal tersebut membuat Serbia geram dan memutuskan untuk mengambil langkah tegas bagi negara-negara yang memberikan dukungan bagi kemerdekaan Kosovo. Hal ini seperti disampaikan oleh Menlu Serbia Vuk Jeremic di depan para wartawan usai sidang darurat Dewan Keamanan PBB membahas kemerdekaan Kosovo di markas besar PBB di New York :

*“ Ya, Anda tahu sendiri konsekuensinya apa. Kami tidak bisa meneruskan hubungan yang normal lagi dengan negara-negara manapun yang tidak menghormati kedaulatan negara kami. Hubungannya tidak akan sama dengan sebelumnya ”.*⁴

³ *Mencari Masa Depan Kosovo*, terdapat di <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/19/Editor/edit01.htm>, akses tanggal 12 Oktober 2008

⁴ *OKI Sambut Kemerdekaan Kosovo*, terdapat di <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=44844>, akses tanggal 8 November 2008

Sebelumnya, Serbia juga sudah mengeluarkan pernyataan yang mengancam, yang ditujukan kepada negara negara pendukung kemerdekaan Kosovo. Hal itu berupa penarikan Duta Besar Serbia dari negara negara yang mendukung upaya pemisahan diri Kosovo. Dan hal itu benar benar telah dilakukan oleh Serbia, seperti yang terjadi kepada Amerika dan beberapa negara Eropa (Perancis, Inggris, Turki, dll). Dan hal itu dibenarkan oleh Menlu Serbia Vuk Jeremic :

*“ Ya betul, mereka (Duta Besar Serbia) sudah kami tarik untuk konsultasi dengan pusat, termasuk Duta Besar kami yang ada di Perancis. Saya tadi baru mendengar dari Duta Besar kami di sini (Dubes Serbia untuk PBB) bahwa Perancis juga telah memberikan pengakuan kepada Kosovo ”.*⁵

Kebijakan kebijakan Serbia yang tegas menunjukkan keseriusannya untuk mempertahankan Kosovo agar tetap menjadi bagian dari kedaulatan negara Serbia. Serbia bahkan berjanji akan menggunakan segala cara diplomasi untuk menggagalkan kemerdekaan Kosovo tersebut. Namun, yang menjadi penghalang bagi Serbia adalah adanya campur tangan asing dalam urusan penyelesaian kemerdekaan tersebut. Amerika dan negara negara Uni Eropa lainnya yang memiliki kepentingan dengan kemerdekaan Kosovo akan terus menjadi penghalang ditemukannya jalan keluar yang dikehendaki Serbia yaitu, Kosovo tetap menjadi bagian dari Serbia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Serbia harus berupaya penuh melancarkan politik luar negerinya untuk memperjuangkan kepentingan tersebut. Tak hanya mencari simpati politik di gedung PBB, Serbia

⁵ *Loc.Cit*

juga harus pandai melobby negara negara lain untuk mendukungnya termasuk kembali mempengaruhi negara negara yang memberikan dukungan kepada Kosovo.

Turki merupakan salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo. Sebagai negara Islam yang sekuler dan moderat di dataran Eropa, Turki merasa ada kewajiban moral tersendiri dalam mengeluarkan kebijakan menghadapi isu kemerdekaan Kosovo. Terikat dalam hubungan sebagai sesama komunitas muslim dan hubungan sosio-historis antara Turki dan Kosovo yang erat, membuat Turki memutuskan untuk mendukung upaya kemerdekaan Kosovo. Dukungan Turki ini terlihat dari adanya upaya untuk menjalin hubungan resmi diplomatik antara kedua negara, yang diawali dengan saling tukar menukar surat antara diplomat Turki dengan para pemimpin Kosovo di Pristina, yang dilakukan segera setelah keluarnya pernyataan resmi Pemerintah Turki yang mendukung kemerdekaan Kosovo.⁶

Keputusan Turki untuk mendukung kemerdekaan Kosovo nampaknya sudah dipertimbangkan dengan matang. Terlihat dari tidak adanya kekhawatiran Turki terhadap kemungkinan bahwa kemerdekaan unilateral Kosovo ini akan menjadi preseden bagi gerakan separatisme lainnya. Turki sendiri yang juga sedang menghadapi gerakan separatisme suku Kurdi di wilayah tenggaranya, berkeyakinan bahwa kasus Kosovo ini sangat berbeda dengan gerakan separatis di

⁶ *Beograd Tarik Dubesnya Dari Negara Yang Akui*, terdapat di <http://www.kapanlagi.com/h/0000214035.html>, akses tanggal 6 Februari 2009

wilayahnya. Menurutnya, situasi politik global sangat mendukung untuk kemerdekaan Kosovo dan tidak pada wilayah Kurdi.⁷

Dukungan ini juga Turki lakukan dalam upaya pemulihan citranya dalam hubungan dengan Uni Eropa yang sebelumnya sempat merenggang. Hubungan Turki dan Uni Eropa merenggang ketika Turki mendukung upaya separatisme Siprus Utara yang memisahkan diri dari Siprus Yunani yang juga merupakan negara anggota Uni Eropa. Kerenggangan inilah yang mempengaruhi kelancaran Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa.⁸ Dan dengan dukungan ini, Turki ingin menunjukkan kesamaan sikap dan berharap bahwa Uni Eropa akan “memaafkan” dan menerimanya sebagai anggota Uni Eropa.

D. Pokok Permasalahan

Pemberian dukungan terhadap kemerdekaan Kosovo oleh Turki, dianggap Serbia sebagai tindakan yang ilegal dan melanggar hukum serta Resolusi PBB. Setelah gagal menyikapi Turki dengan cara cara yang persuasif, “*Bagaimana kebijakan Serbia terhadap Turki yang mendukung kemerdekaan Kosovo ?*”

⁷ *Kemerdekaan Kosovo dan Dilema Dunia Islam*, terdapat di <http://www.ppmipakistan.or.id/?p=89>, akses tanggal 6 Februari 2009

⁸ *Rusia Nyatakan Batas Waktu Perjanjian Kosovo Tidak Mengikat*, terdapat di http://www.kbrimoskow.org/news/111207_Kosovo.htm, akses tanggal 12 Oktober 2008

E. Kerangka Berfikir

Untuk menganalisa permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu teori. Teori adalah bentuk penyelesaian paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi. Teori menggambarkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep konsep itu berhubungan. Untuk memahami fenomena hubungan internasional maka perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep sebagai suatu hal yang tidak dapat dielakkan.

Salah satu konsepsi teori yang dikemukakan oleh Mohtar Mas'ood, menyatakan bahwa teori dalam hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan proposisi atau pernyataan pernyataan tentang misalnya, perilaku rasional berdasar suatu motif dominan seperti kekuasaan. Teori seperti ini dibuat untuk menggambarkan perilaku politik aktor aktor rasional. Misalnya Morgenthau, merumuskan suatu teori politik internasional yang "*dengan membuat gambar tentang keadaan politik yang rasional, teori itu bisa menunjukkan kontras antara keadaan politik yang senyatanya ada dan keadaan politik yang ingin diciptakan, tetapi tidak pernah terwujud*".⁹ Konsepsi teori seperti ini melandasi pembuatan teori deterens, game theory dan beberapa tipe teori pembuatan keputusan.

Menganalisa politik luar negeri memerlukan kerangka berfikir yang dapat memberikan penjelasan saintifik terhadap fenomena tersebut. Politik luar negeri adalah salah satu sarana untuk melakukan eksplanasi teoritik yang komprehensif

⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1990), hal. 22

dalam memahami perilaku politik Serbia terhadap negara-negara yang memberikan dukungan kepada kemerdekaan Kosovo. Penggunaan konsep ini diharapkan bermanfaat untuk menjelaskan mengapa Serbia menolak kemerdekaan Kosovo.

Bagaimanapun luasnya penelaahan tentang perilaku politik luar negeri Serbia terhadap negara-negara yang memberikan dukungan kepada Kosovo, tetapi pada batasan bahwa politik luar negeri merupakan suatu tindakan yang terencana dan sudah diperhitungkan minimal dan maksimalnya tentang untung rugi serta baik buruknya. Suatu mekanisme bagi suatu politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geo-politiknyanya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya.¹⁰

Kebijakan luar negeri sebagaimana diungkapkan Jack O. Plano dan Roy Olton dirumuskan sebagai : *“foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest”*. Dan mereka juga mendefinisikan kepentingan nasional sebagai *“the fundamental objective ultimate determinant that guides the decision makes of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state most vital need. These*

¹⁰ Tulus Warsito, *Teori Teori Politik Luar Negeri; Relevansi dan Keterbatasannya*, Bibrif Publishing: Yogyakarta, 1998, hal. 25

include self preservation, independent, territorial integrity, military security and economic well-being".¹¹

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri (*the foreign decision making process*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan yang sebesar besarnya dan dengan kerugian yang sekecil kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka terapkan.¹²

Untuk menganalisa kebijakan luar negeri Serbia dan untuk dapat menggambarkan strategi yang dapat digunakan oleh Serbia dalam menanggapi dukungan negara lain (dalam hal ini Turki) terhadap kemerdekaan Kosovo, maka Penulis akan berusaha menggunakan dua tipologi.

1. Strategi Politik Luar Negeri

Tipologi strategi politik luar negeri yang dibuat oleh John Lovell berusaha untuk menggambarkan tipe strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Tipologi ini menyediakan empat

¹¹ Jack O. Plano and Roy Olton, *The International Dictionary*, Holt Rinchari, Winston Inc., Western Michigan University : New York, 1973, hal. 127

¹² Mohtar Mas' oed, *Op Cit.*, hal. 276

dimensi yang setelah dipertemu – silangkan akan menghasilkan empat tipe strategis yaitu; konfrontasi, memimpin (*leadership*), akomodasi dan konkordans.

		PENILAIAN TENTANG STRATEGI LAWAN	
		Mengancam	Mendukung
PERKIRAAN KEMAMPUAN SENDIRI	Lebih Kuat	Konfrontasi	Memimpin
	Lebih Lemah	Akomodasi	Konkordans

Sumber : John Lovell, Foreign policy in perspective (Mohtar Mas'oeed, Ilmu Hubungan Internasional - Disiplin dan Metodologi. LP3Es, 1990, Hal 190)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dua buah negara berhadapan dalam persoalan tertentu, maka masing masing negara akan memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan strategi atau kebijakan yang akan ambil. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan strategi atau kebijakan adalah mengenali dan mengukur kemampuan diri sendiri, apakah berada pada posisi yang lebih kuat atau lebih lemah bila dibandingkan dengan negara yang akan dihadapi. Kemampuan tersebut meliputi diantaranya kekuatan politik, ekonomi dan pertahanan (militer). Dan langkah selanjutnya yaitu memperkirakan strategi yang akan diambil oleh negara yang akan dihadapi.

Merujuk pada tipologi di atas, maka terdapat empat opsi yang dapat diambil oleh sebuah negara dalam menentukan kebijakan terhadap negara lain. Pertama, jika sebuah negara menganggap dirinya lebih kuat dari pada negara lawan dan negara lawan diasumsikan berada pada posisi yang mengancam, maka negara tersebut akan lebih logis untuk mengambil opsi “*Konfrontasi*”.

Konfrontasi sendiri dapat diartikan sebagai keadaan yang saling bertentangan. Dan tindakan tindakan konfrontasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan embargo, pemutusan hubungan diplomatik, sanksi yang dikeluarkan secara sepihak atau bahkan dapat berupa perang.

Kedua, jika sebuah negara yang kuat menghadapi persoalan yang membuat negara lain berada dalam posisi mendukung, dan dimana keadaan negara lain tersebut diasumsikan tidak diketahui kuat atau lemahnya, maka kemungkinan opsi yang dapat terjadi adalah “*Memimpin*”. Memimpin dapat berarti menguasai, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengorganisir suatu objek agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.¹³ Memimpin dapat dilakukan dengan cara menjadi pencetus, pemrakarsa atau pemimpin untuk negara lain dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Ketiga, bila sebuah negara yang lemah berhadapan dengan negara lain yang bersifat mendukung atau memiliki visi yang sama dalam menghadapi sebuah persoalan, maka kemungkinan yang terjadi adalah akan terciptanya keadaan yang selaras dan harmonis atau “*Konkordans*”. Walau keadaan ini sangat jarang terjadi, tetapi hal ini masih merupakan sebuah kemungkinan.

Yang terakhir yaitu, bila sebuah negara yang lemah berhadapan dengan negara lain yang lebih kuat dan berada pada posisi yang mengancam, maka opsi yang dapat diambil oleh negara tersebut adalah opsi “*Akomodasi*”. Dalam hal ini, akomodasi diartikan sebagai keadaan dimana negara yang lemah tersebut

¹³ *Kepemimpinan Strategis*, terdapat di <http://www.korpri.or.id/>, akses tanggal 2 November 2008

meminta untuk diselesaikannya persoalan yang terjadi dengan cara yang damai. Hal ini mempertimbangkan kekuatan negara tersebut yang tidak cukup kuat untuk menandingi negara lawan. Langkah akomodasi bisa berupa pernyataan protes atau pengeluaran Nota Keberatan.

Dalam kasus kebijakan luar negeri Serbia yang menarik Duta Besarnya dari Turki karena sikap Turki yang mendukung kemerdekaan Kosovo, Penulis memposisikan kebijakan tersebut sebagai salah satu wujud dari opsi *akomodasi konfrontatif*, dengan memposisikan Serbia berada pada posisi yang lebih lemah dari pada Turki dan Turki berada pada posisi yang mengancam bagi Serbia.

Serbia dipandang lebih lemah dari pada Turki berdasarkan beberapa pertimbangan yang dicermati Penulis, diantaranya :

1. Besarnya ketergantungan Serbia secara Ekonomi terhadap Turki
2. Lebih tingginya tingkat potensi dan kekuatan Turki dibanding Serbia dalam hal ekonomi dan militer
3. Sedikitnya negara yang berani mem-*back up* Serbia
4. Adanya catatan kelam Serbia di masa lalu sebagai aktor dari aksi ethnic cleansing, yang kemudian mencoreng citra dan legitimasi Serbia dimata Internasional

2. Jenis Kebijakan Luar Negeri

K.J Holsti menggambarkan secara umum bagaimana suatu pihak (negara) bertindak melalui berbagai jenis kebijakan luar negeri untuk merespon atau menunjukkan sikap pandangannya terhadap suatu kebijakan pihak lain. Holsti

menggambarkan tahap tahap kebijakan tersebut ke dalam sebuah urutan yang biasanya terjadi. Bentuk bentuk tindakan yang umum itu meliputi :

1. Nota Protes,
2. Penyangkalan dan tuduhan,
3. Memanggil pulang Duta Besar untuk “konsultasi”,
4. Penarikan Duta Besar yang ditugaskan di Ibukota negara lawan,
5. Ancaman “konsekuensi serius” jika tindakan tertentu lawan tidak diakhiri,
6. Ancaman boikot atau embargo ekonomi secara terbatas atau secara total,
7. Pengaduan resmi ekstensif pihak lawan; propaganda di dalam dan di luar negeri,
8. Penerapan boikot atau embargo ekonomi secara terbatas atau penuh,
9. Pemutusan resmi hubungan diplomatik,
10. Tindakan militer tanpa kekerasan – latihan militer, mobilisasi sebagian atau penuh,
11. Gangguan atau penutupan perjalanan dan komunikasi di antara para warga negara yang bermusuhan,
12. Blokade formal,
13. Penggunaan kekuatan terbatas pembalasan, dan
14. Perang – yang mungkin bervariasi menurut sifat tujuan, tingkat kekuatan, ruang lingkup geografis, dan sebagainya.¹⁴

¹⁴ K.J Holsti, *Politik Internasional – Kerangka Untuk Analisis*, edisi ke empat jilid 2, Erlangga: Jakarta, 1988, hal 177

Suatu konflik atau krisis mungkin melibatkan salah satu atau beberapa dari tindakan ini, namun banyak juga yang dapat dilakukan secara serentak. Hendaknya tidak diasumsikan bahwa semua konflik dan krisis perlu “meningkat” dari satu langkah ke langkah berikutnya. Para pembuat kebijakan dapat memutuskan untuk berpindah secara langsung dari pengaduan dan peringatan kepada penggunaan kekuatan militer dan bukan meneruskan langkah demi langkah menuju perang. Perhatikan pula bahwa banyak tindakan di dalam daftar ini melibatkan komunikasi simbolik yang maksud utamanya adalah menekan pihak lawan.

Urutan di atas menunjukkan langkah langkah mulai dari awal hingga akhir, mulai dari cara yang persuasif hingga cara konfrontatif, bagi sebuah negara untuk menunjukkan tanggapannya terhadap kebijakan pihak negara lain. Urutan sikap politik tersebut juga bukan sebuah aturan yang harus ditaati atau dilakukan tahap demi tahap, melainkan hanya sebuah panduan garis besar yang umum terjadi. Ketidakteraturan terhadap urutan urutan tersebut dapat saja terjadi bila terdapat faktor lain yang mempengaruhi situasi.

Holsti juga menambahkan bahwa dalam suatu krisis dimana keputusan yang berkonsekuensi besar harus diambil dengan segera atau berada dalam situasi yang mendesak, maka efek dari proses birokratis dapat dikurangi sebanyak mungkin. Seperti tidak adanya waktu untuk mengadakan konsultasi terperinci, penyusunan makalah jabatan, atau analisis teliti mengenai situasi dan latar belakangnya. Urgensi juga merupakan aspek yang paling menonjol dari definisi

situasi, keputusan harus diambil sebagian besar atas dasar informasi yang tersedia secepatnya, desas desus yang belum diteliti kebenarannya dan pandangan dari para penasihat tingkat tinggi.¹⁵ Keadaan yang mendesak menyebabkan hanya tersedianya sedikit waktu bagi para pembuat kebijakan untuk segera mengambil langkah, karena bila ditunda dikhawatirkan akan ada sejumlah konsekuensi lanjutan yang mungkin berbahaya yang berasal dari tindakan pihak yang menjadi lawan.

Dalam kasus sengketa Serbia dan Turki, terdapat beberapa pengindahan terhadap beberapa langkah yang dirumuskan oleh Holsti. Terlihat dari sikap Serbia yang langsung melakukan penarikan Duta Besarnya dari Ankara - Ibukota Turki, setelah sebelumnya hanya menyampaikan "*penyangkalan dan tuduhan*" terhadap Turki tanpa didahului oleh penyampaian Nota Protes. Ini dilakukan Serbia karena dipengaruhi oleh faktor keterdesakan atau urgensi yang memaksa untuk segera dilakukannya langkah aksi kebijakan, demi mencegah terjadinya reaksi lanjutan dari pihak lawan yang mungkin lebih berbahaya. Selain faktor urgensi, langkah Serbia juga dipengaruhi oleh faktor potensi dan kekuatannya yang ternyata berada lebih lemah dibanding dengan Turki. Ini menyebabkan Serbia "terkunci" untuk tidak dapat bertindak lebih tegas dengan sikap yang lebih konfrontatif. Sehingga dari sekian jenis kebijakan, Serbia hanya memiliki peluang untuk melakukan langkah langkah yang pada dasarnya hanya bersifat akomodatif saja.

¹⁵ *Ibid*, hal 103

Dapat disimpulkan bahwa dengan situasi yang mendesak dan dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dan potensi Serbia yang lebih lemah dibanding Turki, maka Serbia hanya bisa melakukan aksi aksi yang bersifat akomodasi konfrontatif. Dan akibat keterbatasan itu pula, Serbia memutuskan untuk segera melakukan sikap yang dirasa paling optimal yang bisa diambil yaitu dengan melakukan penarikan terhadap Duta Besarnya dari Ankara – Turki tanpa didahului dengan pengiriman Nota Protes.

F. Hipotesa

Hipotesa sementara dari skripsi ini adalah :

Serbia yang memiliki potensi lebih lemah dibanding Turki, menjatuhkan kebijakan akomodasi konfrontatif terhadap Turki karena sikapnya yang mendukung kemerdekaan Kosovo. Akomodasi - dengan mengangkat isu ancaman terhadap Turki, dan konfrontatif - dengan melakukan penarikan terhadap Duta Besarnya dari Ankara – Turki.

G. Jangkauan Penelitian

Guna mencegah melebarnya topik penulisan, maka Penulis menentukan jangkauan rentang waktu penelitian. Adapun jangkauan rentang waktu topik permasalahan adalah sejak dimulainya isu tentang kemerdekaan Kosovo yaitu

pada awal tahun 2008 (bulan Februari) hingga kini. Namun apabila dalam penulisannya masih dirasa terdapat hal hal yang relevan dan valid mengenai isu tersebut tetapi berada di luar jangkauan waktu penelitian, maka tidak menutup kemungkinan Penulis juga akan menggunakannya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

H. Metode Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, Penulis menggunakan metode kepustakaan atau Penelitian Kepustakaan (*Library research*). Dimana dalam mengumpulkan data digunakan metode literatur dengan cara menelaah buku buku, makalah ilmiah, jurnal, koran, majalah, artikel dan sumber lainnya yang dianggap relevan. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan kerangka berfikir yang telah ditentukan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan Yang Berisi :

- A. Alasan Pemilihan Judul;
- B. Tujuan Penelitian;
- C. Latar Belakang Masalah;
- D. Pokok Permasalahan;
- E. Kerangka Teori;
 - 1. Strategi Politik Luar Negeri, dan
 - 2. Jenis Kebijakan Luar Negeri
- F. Hipotesis;
- G. Jangkauan Penelitian;
- H. Metode Penelitian, dan
- I. Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi penjelasan tentang Politik Luar Negeri Serbia, antara lain :

- A. Gambaran Umum Serbia;
- B. Gambaran Politik Serbia;
 - 1. Politik Domestik,
 - 2. Politik Luar Negeri;
- C. Potensi Serbia;
- D. Serbia Dalam Internasional;
- E. Kosovo Dalam Serbia, dan
- F. Sikap Serbia Mengenai Kemerdekaan Kosovo.

BAB III Berisi pembahasan tentang Politik Luar Negeri Turki Dalam Hal Kemerdekaan Kosovo, antara lain :

- A. Hubungan Turki - Yugoslavia;
- B. Hubungan Turki – Serbia;
- C. Hubungan Turki – Kosovo, dan
- D. Dukungan Turki Terhadap Kemerdekaan Kosovo.

BAB IV Berisi pembahasan tentang Kebijakan Luar Negeri Serbia Terhadap Turki Dalam Hal Kemerdekaan Kosovo

- A. Pengiriman Nota Protes
- B. Penarikan Duta Besar
- C. Peninjauan Kembali Hubungan Diplomatik
- D. Mobilisasi Instrumen Kekuatan Militer

BAB V Kesimpulan.